

Ancaman di Lautan Pala: Mekanisme dan Efektivitas Patroli Hongi dalam Mempertahankan Monopoli Perdagangan VOC di Maluku

Agnesia Margareta Purba¹ Amanda Fayrisha Nasution² Muhammad Naufal Syafiq
Purba³ Rafli Edelweis Turnip⁴ Rosmaida Sinaga⁵

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: agnesiamargaret2@gmail.com¹ fayrishaamanda@gmail.com² rafliturnip7@gmail.com³
naufalpurba21@gmail.com⁴ rosmaidasinaga@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang patroli Hongi sebagai strategi VOC dalam mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku pada abad ke-17 hingga ke-18. Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai penghasil cengkeh dan pala terbaik di dunia menjadi sasaran utama VOC untuk dikuasai sepenuhnya. Melalui sistem patroli Hongi, VOC melakukan pengawasan ketat terhadap produksi dan perdagangan rempah dengan cara menghancurkan tanaman rempah di luar wilayah yang ditentukan serta menghukum berat para penyelundup. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk menganalisis tiga hal utama: mekanisme operasional patroli Hongi, efektivitas patroli dalam mempertahankan monopoli, dan dampak sosial-ekonomi serta ekologis terhadap masyarakat Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patroli Hongi memang efektif secara ekonomi bagi VOC dengan menjaga stabilitas harga rempah di Eropa, namun menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat Maluku, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Sistem ini menghancurkan ekonomi tradisional, memecah belah masyarakat, merusak ekosistem, dan merampas kedaulatan maritim masyarakat Maluku.

Kata Kunci: Patroli, Hongi, Monopoli, VOC, Maluku, Rempah rempah, Sejarah, Maritim

Abstract

This research examines the Hongi patrols as the VOC's strategy to maintain its monopoly over the spice trade in Maluku during the 17th and 18th centuries. The Maluku Islands, known as the world's finest producers of cloves and nutmeg, became the primary target for complete VOC control. Through the Hongi patrol system, the VOC conducted strict supervision over spice production and trade by destroying spice plants outside designated areas and severely punishing smugglers. This research employs a library research method to analyze three main aspects: the operational mechanism of Hongi patrols, the effectiveness of patrols in maintaining monopoly, and the socio-economic and ecological impacts on Maluku society. The findings indicate that Hongi patrols were indeed economically effective for the VOC in maintaining spice price stability in Europe, but caused highly detrimental impacts on Maluku society from economic, social, and environmental perspectives. This system destroyed the traditional economy, divided communities, damaged ecosystems, and seized the maritime sovereignty of Maluku society.

Keywords: Patrol, Hongi, Monopoly, VOC, Maluku, Spices, History, Maritime



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kepulauan Maluku (The Spice Island), dikenal sebagai salah satu daerah penghasil rempah terbaik di dunia, terutama komoditas seperti cengkeh dan pala yang memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh kepulauan Maluku menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang ramai bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa. Pada abad pertengahan terutama sebelum datangnya bangsa Eropa, perdagangan rempah rempah di wilayah Maluku dilakukan oleh pedagang pedagang Arab, Cina, Melayu, dan India yang berhubungan langsung dengan Masyarakat lokal. Kedatangan

Perusahaan Kongsi dagang hindia timur atau yang biasa disebut sebagai Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada awal abad ke 17, yang memiliki hak monopoli (Ooctoroii) seperti monopoli perdagangan, memiliki Angkatan laut sendiri, menyatakan perang dan membuat perjanjian Bersama Masyarakat lokal membuat VOC dengan leluasa menguasai produksi dan distribusi rempah rempah. Salah satu Upaya VOC untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku adalah pelayaran Hongi atau *Hongitochten*.

Pada penelitian ini, akan dibahas secara khusus tentang analisis pelayaran Hongi sebagai suatu alat untuk mempertahankan hegemoni VOC atas ekonomi Maluku. Pembahasan akan mendalam tentang bagaimana pelayaran Hongi menjadi sebuah terror meritim yang melibatkan Masyarakat lokal secara paksa. Keberhasilan sistem ini tidak hanya diukur dari keberhasilan ekonominya melainkan memiliki dampak sosial dan budaya yang terasa hingga saat ini. Permasalahan pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme operasional patroli Hongi dalam sistem monopoli VOC, kedua sejauh mana efektivitas Patroli Hongi dalam mempertahankan monopoli perdagangan atas rempah rempah, dan yang ketiga adalah bagaimana dampak sosial-ekonomi dan ekologis dari sistem patroli Hongi terhadap Masyarakat Maluku. Penelitian ini akan memberikan Gambaran dan pemahaman bagaimana Pelayaran Hongi menjadi sebuah alat kekerasan yang digunakan untuk kepentingan ekonomi kolonial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian Library Research atau kajian Pustaka terhadap sumber sumber sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pelayaran Hongi, Sejarah VOC, Perdagangan rempah rempah, dan Sejarah maritim Maluku. Sumber sumber tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan data yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan umum yang akan dikaji lebih pada penelitian ini. Adapun tahapan dalam penelitian ini seperti pengumpulan sumber sumber yang relevan dengan topik penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mencari data data yang dibutuhkan dari setiap sumber dan menghubungkannya dengan topik penelitian lalu disusun menjadi sebuah narasi. Untuk itu, dimanfaatkan pandangan dari aspek ekonomi politik dan kajian maritim untuk memahami sistem pelayaran Hongi. Dalam penulisan, digunakan gaya Bahasa akademis yang lugas agar mudah dipahami pembaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1605, Portugis yang sudah lebih dahulu menguasai Ambon berhasil diusir oleh VOC. Hal ini menandai dimulainya babak baru pada pola perdagangan rempah di Maluku. Sebelum masa kolonial, perdagangan rempah berlangsung dengan netral yang melibatkan banyak pedagang dari berbagai tempat seperti India, Cina, Arab, dsb. Setelah VOC berkuasa di Maluku, seluruh control atas perdagangan rempah dipusatkan kepadanya. Strategi awal VOC adalah memusatkan produksi rempah rempah pada wilayah tertentu yang mudah dikontrol. *Dengan demikian, VOC di Ambon bebas membangun suatu sistem monopoli cengkih di Maluku. Sudah sejak tahun 1652 Gubernur VOC di Ambon memerintahkan penduduk untuk menanam cengkih. Namun, kebun-kebun cengkih itu hanya dibatasi pada empat pulau, yaitu Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusalaut. Di pulau-pulau lainnya yang pernah menghasilkan cengkih ketika masih dikuasai Ternate, yaitu di jazirah Hoamoal dan pulau-pulau kecil di sekitarnya berlaku pelatangan seperti tertera dalam perjanjian dengan Sultan Mandar Syah (extierpatie dan hongitochten)*(Poesponegoro 2019). Sementara untuk pala, produksi dipusatkan di Kepulauan Banda. Hal ini dilakukan agar pengawasan lebih mudah dan biaya operasional lebih sedikit. *Latar belakang institusional yang penting bagi intensifikasi pelayaran Hongi adalah keberhasilan Gubernur Arnold de Vlaming pada Januari 1652 untuk mendesak*

Sultan Ternate Mandar Syah menandatangani perjanjian yang mengubah total lanskap produksi rempah di Maluku. Terjadi pula kesepakatan antara pihak VOC dengan penguasa lokal yang mengharuskan para pedagang rempah lokal menyerahkan seluruh hasil panennya kepada VOC. Imbalannya, VOC memberikan perlindungan militer terhadap serangan dari pihak lain (Purwanda, 2022).

Akan tetapi, penetapan lokasi produksi rempah yang dilakukan VOC tetap mengalami tantangan. Komoditas perdagangan banyak mengalami penyelundupan oleh pedagang pedagang Makassar, Inggris, dan pedagang lokal yang menolak monopoli VOC. Penyelundupan ini tentu akan mengancam kestabilan harga rempah dipasar Eropa karena adanya pasokan komoditas diluar dari VOC. Untuk mengatasi hal ini, VOC menerapkan sebuah cara untuk mengontrol perdagangan rempah dilautan Maluku yaitu dengan pelayaran Hongi. *Sejak awal, VOC menjalankan pelayaran hongi atau ekspedisi ke berbagai wilayah di Maluku untuk menghancurkan tanaman cengkeh. Ekspedisi seperti ini setidaknya memiliki dua tujuan yaitu; pertama, meredam produksi cengkeh sehingga harganya tetap terkontrol, dan kedua, menutup akses pedagang gelap (terutama pedagang dari Makassar) yang sering melakukan kontak dagang dibeberapa tempat di wilayah Maluku* (Wattimury, Batkunde, and Pattiasina 2021). Istilah Hongi berasal dari Bahasa Maluku yang merujuk pada ekspedisi perang dan patroli maritim. Pelayaran hongi telah berlangsung sejak masa pendudukan Portugis dan sistem ini dilanjutkan oleh Belanda setelah berhasil merebut penguasaan atas wilayah Maluku. *Sejak pemerintahan Portugis, telah berlangsung hubungan antara penduduk Leitimor (bagian timur Pulau Ambon) untuk menyediakan perahu pengangkut yang disebut dengan kora-kora (perahu tradisional Maluku). Armada inilah yang kemudian digunakan untuk melaksanakan pelayaran hongi atau pada masa Belanda disebut ekspedisi hongitochten* (Claire, 2025). Sistem ini sebenarnya sudah berlangsung dari Zaman Portugis, dan Kembali diadopsi oleh VOC menjadi lebih sistematis.

Pelaksanaan Patroli Hongi tidak hanya dilakukan oleh kapal kapal VOC tetapi juga melibatkan perahu Tradisional Maluku yang dikenal sebagai kora-kora, yang dikenal besar dan cepat. Strategi VOC ini berhasil memanfaatkan penduduk lokal untuk kepentingan kolonial. Setiap melakukan patroli, biasanya terdiri dari tiga kapal perang VOC yang berfungsi sebagai komando dan artileri, dan kemudian diikuti oleh puluhan kora-kora dari Ambon dan Lease. Salah satu kora-kora yang terkenal berasal dari Titawai dipulau Nusalaut yang memiliki empat nuju (Tingkat). Masyarakat wajib menyediakan kora-kora untuk keberlangsungan pelayaran hongi tersebut. Hal ini kemudian menjadi beban berat bagi Masyarakat lokal karena mereka dipaksa untuk menyediakan perahu dan sekitar 40-60 orang pendayung perahu yang berfungsi sebagai tentara. Pelayaran Hongi dilakukan biasanya satu hingga dua kali setahun sesuai dengan situasi. Adapun rute patrolinya meliputi perairan Maluku utara hingga Maluku Tenggara khususnya pada pulau-pulau yang memiliki potensi penanaman cengkeh dan pala diluar wilayah yang sudah ditentukan oleh VOC. Pelayaran hongi memiliki sebuah pola dimana Ambon akan menjadi pusat komando dan armada akan berlayar menyusuri pulau-pulau dalam rute yang telah ditetapkan. Ketika singgah disuatu pulau, mereka akan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada tanaman cengkeh dan pala liar. Jika ditemukan maka tanaman rempah liar tersebut akan dimusnahkan dengan cara ditebang dan dibakar yang disebut juga dengan istilah extirpation. *Pohon cengkeh (yang berbuah maupun yang tidak) akan ditebang oleh tentara ekspedisi itu. Penebangan pohon pohon cengkeh itu dikenal dengan sebutan extirpation* (Poesponegoro 2019). Dalam catatan Sejarah disebutkan bahwa dalam satu ekspedisi Hongi antara 10 Desember 1728 hingga 1729, sebanyak 96.000 pohon rempah berhasil dimusnahkan. Di kepulauan Makian, Maba, Weda, dan Ternate 117.000 pohon juga dimusnahkan antara tahun 1731-1732.

Pelaksanaan patrol Hongi ini bukan hanya sebagai operasi untuk mengontrol keamanan perdagangan saja melainkan juga menjadi sebuah terror psikologis bagi Masyarakat. Masyarakat yang melakukan penanaman rempah seperti cengkeh dan pala diluar wilayah yang telah ditentukan oleh VOC atau masyarakat yang terlibat dalam penyelundupan rempah kepada pedagang asing akan diberi hukuman berat seperti denda, pengusiran paksa dari tempat tinggalnya, bahkan proses eksekusi. Hukuman ini menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat Maluku untuk tidak berani menentang monopoli VOC. Setiap kali armada Hongi mendekat, Meriam akan ditembakkan, desa desa Dibakar, dan banyak penduduk yang melarikan diri ke pedalaman. Jika dilihat dari sudut pandang VOC, patroli hongi ini dianggap mampu membantu mereka dalam mencapai tujuan utamanya yaitu mempertahankan monopoli dan kestabilan harga rempah dipasar Eropa. Sejak sistem patrol hongi diterapkan pada abad ke 17, Pasokan cengkeh dan pala di Eropa bisa dikendalikan oleh VOC. Ini menjadikan VOC bisa mengatur produksi sesuai permintaan pasar, sehingga tetap memiliki harga yang tinggi dan menguntungkan bagi Belanda. Pada tahun 1620, harga cengkeh sempat mencapai 70 real perbahar (setara dengan 7 gram emas). Hal ini menjadikan VOC sebagai salah satu Perusahaan yang mencapai margin sangat tinggi. Dipuncak kejayaan VOC, pemegang saham bisa menerima dividen yang mencapai 40% pertahun. Penyelundupan komoditas perdagangan diwilayah maluku juga berhasil ditekan melalui pelayaran hongi ini. Pedagang pedagang Makassar mulai terpinggirkan dan pedagang Inggris yang sebelumnya berusaha untuk membangun basis di Banda harus menyerah kepada militer VOC.

Namun, pelaksanaan patrol hongi ini tetap memiliki sebuah keterbatasan. Sistem ini sangat bergantung pada kebutuhan dan partisipasi dari masyarakat lokal yang dipaksa untuk melakukan patrol ini. Hal ini menyebabkan munculnya banyak perlawanan dari Masyarakat lokal seperti pemberontakan di Hitu, Iha, dan Banda. Pemberontakan ini menyebabkan pelaksanaan patrol ini terganggu dan membutuhkan biaya tambahan untuk menutup perlawanan yang terjadi dari Masyarakat lokal. Armada armada yang digunakan oleh VOC dalam melaksanakan patrol ini juga membutuhkan biaya untuk perawatannya selain itu, Pembayaran kompensasi kepada daerah daerah yang menyediakan kora kora serta biasanya logistik untuk keberlangsungan ekspedisi membutuhkan biaya yang sangat besar. Melemahnya kondisi keuangan VOC pada akhir abad ke-18 juga turut menurunkan intensitas patrol hongi. Meskipun patrol hongi berhasil menekan penyelundupan yang terjadi, sistem ini tidak mampu untuk menghentikannya sepenuhnya. Salah satu contohnya adalah kasus Pierre Poivre yang berhasil menyelundupkan bibit cengkeh dan pala ke Mauritius pada tahun 1770-an. Kasus ini menunjukkan bahwa patrol hongi tetap memiliki celah untuk melakukan penyelundupan. Penyelundupan ini kemudian perlahan mengakhiri monopoli VOC atas perdagangan rempah eropa karena tanaman rempah berhasil dibudidayakan di tempat lain.

Dampak yang paling mendasar dari adanya pelayaran hongi ini adalah sistem ekonomi tradisional yang Masyarakat Maluku yang mengalami kehancuran. Sebelum kedatangan VOC, Masyarakat maluku bebas untuk menjual hasil rempahnya kepada pihak manapun yang dianggap memiliki harga lebih baik. Setelah adanya monopoli VOC, Sistem dati untuk cengkeh dan perken untuk pala membuat hak ekonomi Masyarakat hilang. Knaap, 1987 dalam Sinaga, 2020 mengatakan *Sebagai wajib pajak, setiap keluarga (extended family) dinamakan dati. Istilah itu berasal dari bahasa-bahasa Ternate yang di Maluku Tengah diartikan sebagai pajak atau upeti, bukan dalam uang atau natura, tetapi dalam bentuk tenaga kerja. Setiap dati wajib menyerahkan setiap tahun satu anggotanya untuk "heerendiensten" selama "Hongitochten"* (Sinaga, 2020). Petani cengkeh dipaksa untuk menjual hasil panennya kepada VOC yang harganya telah ditentukan secara sepah oleh VOC. Harga yang ditawarkan seringkali hanya berkisar antara 10-20% dari harga pasar Internasional. Sementara itu, sistem parken yang

berlaku untuk pala mengakibatkan masyarakat lokal terusir dari tanahnya sendiri. Pada tahun 1621, terjadi pembantaian yang menewaskan hampir 90% populasi Masyarakat. Ini terjadi sebagai akibat dari penolakan Masyarakat atas monopoli yang dilakukan oleh VOC (Isma).

Dalam sistem sosial, hongi menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial dikalangan Masyarakat. Kewajiban dinas hongi yang mengharuskan laki laki untuk ikut berpatroli membuat mereka terpisah dari keluarga dan Masyarakat dalam kurun waktu yang lama. Banyak yang tidak berhasil kembali karena meninggal dalam pertempuran atau terkena penyakit karena aekspedisi. Mata pencaharian yang berfokus pada sektor pertanian mulai berubah karena tidak adanya laki laki yang mengelolanya. Hal ini mengganggu siklus pertanian dan kehidupan sosial Masyarakat. Lebih dari itu, sistem ini juga berakibat pada terjadinya perpecahan internal dalam Masyarakat Maluku. Divide et impera yang digunakan oleh VOC untuk mengadu domba wilayah wilayah Maluku. Beberapa wilayah yang mampu bekerja sama dengan pihak VOC akan mendapatkan privilese dan dibebaskan dari kewajiban untuk ikut dalam patrol hongi. Sementara wilayah yang lain dibebani beban berat. Tidak hanya dalam sistem sosial, hongi juga berdampak pada kerusakan ekologis. Ekstirpasi yang dilakukan oleh VOC merupakan bentuk perusakan terhadap alam. Puluhan bahkan ratusan ribu tanaman cengkeh dan pala dimusnahkan. Pohon pohon yang dimusnahkan seringkali adalah pohon pohon tua yang telah tumbuh selama ratusan tahun. Praktek ekstirpasi ini juga menghancurkan pengetahuan tradisional masyarakat tentang budidaya dan pemanfaatan rempah rempah yang telah berkembang lama.

Patroli Hongi juga merampas kedaulatan maritim Masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku sudah memiliki hubungan yang dalam dengan laut dan telah dijadikan sebagai ruang bebas untuk pelayaran dan perdagangan. Setelah adanya Hongi, laut berubah menjadi zona terlarang yang dikendalikan oleh VOC. Masyarakat Maluku harus memiliki surat jalan untuk melakukan pelayaran yang menjadikan Masyarakat maritim yang dulunya bebas menggunakan laut kini harus meminta izin untuk menggunakan lautnya sendiri. Sistem ini juga disebut sebagai sistem pasbrief. Perubahan ini berdampak pada hilangnya identitas dan budaya maritim dari masyarakat maluku. Keterampilan navigasi dan pelayaran jarak jauh yang sebelumnya dikuasai oleh Masyarakat Maluku perlahan menghilang karena pelarang hongi (budaya Bahari).

KESIMPULAN

Patroli Hongi merupakan sistem pengawasan maritim yang dijalankan VOC untuk mempertahankan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Sistem ini bekerja dengan melibatkan armada kapal VOC dan perahu tradisional kora-kora yang dipaksa disediakan oleh masyarakat lokal. Patroli dilakukan satu hingga dua kali setahun untuk menghancurkan tanaman cengkeh dan pala di luar wilayah yang telah ditentukan VOC, serta memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang melanggar aturan monopoli. Dari sisi ekonomi VOC, patroli Hongi terbukti efektif dalam mengendalikan pasokan rempah ke Eropa sehingga harga tetap tinggi dan menguntungkan. VOC berhasil menekan aktivitas penyelundupan dan menyingkirkan pesaing seperti pedagang Makassar dan Inggris. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada partisipasi paksa masyarakat lokal, membutuhkan biaya operasional yang besar, dan akhirnya gagal mencegah penyelundupan bibit rempah ke wilayah lain yang mengakhiri monopoli VOC.

Dampak patroli Hongi terhadap masyarakat Maluku sangat merugikan. Sistem ekonomi tradisional hancur karena masyarakat dipaksa menjual hasil panen dengan harga sangat rendah dan kehilangan hak atas tanah mereka. Struktur sosial rusak akibat laki-laki dipaksa berpartisipasi dalam patroli, meninggalkan keluarga dan pekerjaan pertanian. Politik adu

domba VOC memecah belah masyarakat Maluku. Dari segi ekologis, ratusan ribu pohon rempah tua dimusnahkan, dan pengetahuan tradisional tentang budidaya rempah hilang. Yang paling fundamental, patroli Hongi merampas kedaulatan maritim masyarakat Maluku dengan mengubah laut dari ruang bebas menjadi zona yang dikontrol ketat melalui sistem surat jalan (pasbrief). Secara keseluruhan, patroli Hongi adalah contoh nyata dari kekerasan kolonial yang dijalankan untuk kepentingan ekonomi. Meskipun menguntungkan VOC dalam jangka pendek, sistem ini meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Maluku yang dampaknya masih terasa hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. Adnan. 2016. *Sejarah Kepulauan Rempah Rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara*. Jakarta: Gramedia.
- Claire, Pessy Natalia. et al. 2025. "Budaya Maritim Maluku Dan Hubungannya Dalam Perdagangan RempahRempah Masa VOC, 1605-1799." *Fajar Historia Jurnal Ilmu Sejarah dan Pendidikan* 9(1): 100–114.
- Jack, Turner. 2019. *Sejarah Rempah Dari Erotisme Sampai Imperialisme*. Depok: Komunitas Bambu.
- Lailiyah, Nur Isma, Ana Khairunnisaa, and Elizabeth Dewi Ekaristiningrum. 2021. "Merawat Ingatan Peristiwa Genosida Dan Dominasi VOC Di Banda Tahun 1621 (Dalam Perspektif Sosial-Ekonomi)." *Historiography: Journal of Indonesian History and Education* 1(4).
- Poesponegoro, Marwati Djoened. 2019. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV Kemunculan Penjajahan Di Indonesia (±1700-1900)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanda, Sunardi, and Fakultas Hukum. 2022. "Tanaman Rempah Asli Indonesia The Loss Of Exclusive Rights Of Indonesian." 8(1).
- Rahman, Fadly. 2019. "Negeri Rempah Rempah, Dari Masa Bersemi Hingga Gugurnya Masa Kejayaan Rempah Rempah." *Jurnal Pajantala* 11(3): 347–62.
- Sinaga, Rosmaida et al. 2020. *Kolonialisme Belanda Dan Multikulturalisme Masyarakat Kota Medan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sinaga, Rosmaida, Yosafat Lesmana, Tampubolon Gema, and Persada Tarigan. 2024. "Penjelajahan Samudera Orang Portugis." *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation* 1(2): 335–45.
- Syahruddin, Mansyur. 2011. "Jejak Tata Niaga Rempah-Rempah Dalam Jaringan Perdagangan Masa Kolonial Di Maluku." *Kapata Arkeologi* 7(13): 20–39.
- Wattimury, Samuel Michael, Arnold Batkunde, and Johan Pattiasina. 2021. "Jejak Peran Orang Nusalaut Dalam Pelayaran Hongi." *Jurnal LANI* 2(2): 22–32.